

Luhut: Nggak Pernah di Pemerintahan Nggak Usah Banyak Omong

JAKARTA (IM) - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbicara digitalisasi dengan mengungkap ada sebanyak 27 ribu aplikasi yang terdapat di pemerintahan, salah satunya belanja melalui e-catalog. Luhut menyarankan pihak yang tidak pernah di pemerintahan untuk tidak banyak berbicara.

Hal ini dikatakan Luhut di acara Kemenpan-RB dengan tema "Digital Government Award SPBE Summit 2023" seperti yang disiarkan di YouTube Kementerian PANRB pada 20 Maret 2023. "Ternyata kita punya 27 ribu aplikasi seluruh pemerintahan ini. Itu punya berapa banyak vendor itu. Sekarang saya lihat banyak, saya katakan adek-adek yang muda dari ahli, ayok tunjukkan kau ini orang Indonesia hebat. Satukan itu. Nggak usah pakai uang-uang," kata Luhut dalam sambutannya, seperti dikutip pada Minggu (26/3).

Luhut menyebut digitalisasi di Indonesia telah berjalan dengan spesifik dan bertahap.

"Karena itu itu peduliindungi nggak ada uang-uang itu. Kita bisa bikin dan menjadi satu apps yang terbaik di dunia. Itu orang Indonesia. Dan itu anak muda Indonesia. Dan saya juga percaya di antara anda sekalian itu bisa melakukan.

Sekarang kita lihat digitalisasi yang jalan. Anda lihat sekarang e-catalog itu ada 105 miliar dollar, atau Rp 1.600 triliun yang selama ini kita impor. Hampir 90 persen," katanya.

"Sekarang bertahap dari tahun lalu itu sudah mulai e-catalog, pak Anas punya prestasi. Itu sudah Rp 400 triliun tahun lalu. Tahun ini presiden memberikan instruksi kemarin di Senayan, itu 90 persen kita harus capai tahun ini. Dan itu bisa," katanya menambahkan.

Menurutnya, proses digitalisasi ini tak mudah dilakukan. Dia meminta pihak yang kerap memberikan kritik untuk tidak mudah untuk berbicara.

"Karena apa dampaknya ini? Ini orang yang nggak banyak tahu. Makanya orang yang nggak pernah di pemerintahan itu nggak usah banyak omong. Tidak gampang mengerjakan. Anda kan sudah merasakan sebagai bupati sama gubernur. Omong ngkritik gampang aja. Lu masuk di dalam baru tahu lu," katanya.

"Kalau lu kerja main-main ya ketangkap OTT itu kau, itu aja. Jadi, nggak usah banyak omonglah. Dia pikir gampang emang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintahan, kita tanya apa yang pernah kau perbuat selama kau menjabat?" katanya nada bertanya. ● me

Sandiaga akan Sowan ke Prabowo Usai Didukung DPW PPP Gorontalo

JAKARTA (IM) - Sandiaga Uno mengaku akan berkonsultasi ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait dukungan DPW PPP Gorontalo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sandiaga mengaku mengapresiasi PPP yang mendukungnya sebagai calon presiden (capres).

"Tentunya itu kita apresiasi, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa keputusannya adalah di partai politik dan tentunya saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, saya akan segera bertemu dengan Bapak Prabowo," ujar Sandiaga Uno usai bersilaturahmi dengan DPW PPP Gorontalo di Hotel Aston Gorontalo, Minggu (26/3) malam.

Sandiaga mengaku

kedatangannya bertemu pengurus DPW Gorontalo sekadar silaturahmi. Dia mengatakan hanya pulang kampung untuk bertemu dengan keluarga besar di tanah kelahirannya.

"Saya di sini hadir sebagai bagian daripada silaturahmi sebagai keluarga besar, senang saya bisa berjumpa (dengan keluarga besar)," bebernya.

Sandiaga enggan berbicara panjang lebar terkait dukungannya tersebut. Dia beralasan ingin fokus ibadah di bulan Ramadan.

"Kita jeda sebentar, kita cooldown dulu untuk pembahasan-pembahasan politik praktis, kita renungkan di bulan suci Ramadan ini nanti kita pastikan langkah-langkah ke depan," ujarnya. ● me

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



BUKA PUASA BERSAMA PARTAI NASDEM

Ketum Partai Nasdem Surya Paloh (ketiga kiri) bersama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan), Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan), Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri), Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan), dan bakal calon presiden dari KKP (Koalisi Perubahan untuk Persatuan) Anies Baswedan (kedua kiri) menghadiri buka puasa bersama Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, Sabtu (25/3).

Bakal Dipolisikan Lantaran Bocorkan Transaksi Rp349 Triliun, Ini Kata PPATK

Kepala PPATK Ivan mengapresiasi rencana MAKI yang akan melaporkan PPATK ke Polisi terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu.

JAKARTA (IM) - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) berencana melaporkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustianandana ke Bareskrim Polri, pekan depan.

Ivan dituding membocorkan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menanggapi rencana peyarakat ke pihak kepolisian tersebut, Ivan menegaskan bahwa apa yang dilakukan PPATK sudah sesuai koridor hukum. Ivan memastikan pihaknya telah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya dengan tetap menjaga nilai akuntabilitas, integritas, dan independensi.

"Kami tetap menjaga

akuntabilitas, integritas dan independensi dalam menjalankan tugas, fungsi serta kewenangan kami," tegas Ivan saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (26/3).

"Termasuk pada kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Semua dilakukan sesuai koridor hukum yang menjadi dasar pijakan kami selama ini," ujarnya.

Kendati demikian, Ivan mengapresiasi rencana MAKI yang akan melaporkan PPATK ke pihak kepolisian berkaitan dengan transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu. Menurutnya, salah

satu bentuk dukungan dan perhatian masyarakat kepada PPATK.

"Terima kasih setulus-tulusnya kepada segenap lapisan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan atas perhatiannya kepada kami. Tentunya kami membutuhkan partisipasi tersebut untuk menjadi semakin kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU-TPPT-PPSPM di Indonesia," tuturnya.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman sebelumnya mengatakan akan melaporkan Kepala PPATK dan Menko Polhukam Mahfud MD ke Bareskrim Polri, pekan depan. Rencana pelaporan ini merupakan tindak lanjut atas pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, Arteria Dahlan saat rapat dengar pendapat dengan Kepala PPATK.

Di mana, saat itu Arteria Dahlan menyinggung adanya ancaman pidana penjara paling lama empat tahun bagi pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang kewajiban merahasiakan dokumen terkait TPPU.

Atas dasar itu, Boyamin kemudian berniat melaporkan dugaan unsur pidana tersebut ke pihak kepolisian.

"Menindaklanjuti statement DPR yang menyatakan ada pidana yang disampaikan PPATK dalam rapat Komisi III kemarin, maka MAKI minggu depan akan membuat laporan kepada kepolisian berkaitan dengan tindak lanjut apa yang dikatakan oleh Anggota Komisi III DPR tersebut bahwa proses yang dilakukan PPATK itu menganggu unsur pidana," ujar Boyamin. ● han

Mahfud MD: Tempat Ibadah Boleh Digunakan Kapanye Politik, Tapi Bukan Politik Praktis

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan, kegiatan politik boleh dilakukan di tempat-tempat ibadah, tapi bukan untuk politik praktis.

Ia menjelaskan bahwa dalam politik ada dua tingkatan, dan tingkat yang pertama adalah politik inspiratif atau ideologi.

"Bolehkan menggunakan tempat ibadah sebagai kegiatan politik? Boleh. Karena tempat ibadah merupakan tempat kegiatan politik. Lahirnya ide-ide politik itu agama, tetapi politik itu ada dua tingkat, satu politik inspiratif atau politik ideologi" ujar Mahfud MD seperti dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (26/3).

"Yaitu keadilan kejujuran, demokrasi. itu boleh kampanye di ruang agama karena itu yang setiap hari disampaikan mubaligh di masjid. "Hei, kamu harus adil!" itu kan politik," ujarnya.

Namun Mahfud MD menegaskan, kampanye

yang tidak boleh dilakukan di tempat ibadah adalah terkait politik praktis.

"Tetapi yang tidak boleh itu politik praktis. 'Hei kamu milih ini ya, jangan milih ini ya' 'Pilih partai ini jangan pilih partai yang ini,' itu tidak boleh karena akan menimbulkan perpecahan," katanya.

Sebelumnya Mahfud MD mengatakan, agama dan negara adalah dua saudara kembar. Hal tersebut disampaikan di depan para kader PDI Perjuangan.

"Negara dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Pertama negara itu dihuni oleh pemeluk agama, tidak bisa kita bernegara kok tidak pakai agama. Maka kalau di dalam Islam itu, kamu beragama dan punya kekuasaan negara itu dua saudara kembar," ujar Mahfud MD. "Bernegara kok tidak ada nilai-nilai agama, itu bisa sesat," katanya.

Karena itu, Mahfud mengatakan Indonesia bahkan disebut *religius nation state*, bukan *islamic nation state* atau

kristen nation state. "Tapi *religius nation state*," ujar Mahfud MD.

Secara terpisah, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty, mewanti-wanti peserta Pemilu 2024 agar tidak memanfaatkan bulan Ramadhan untuk kegiatan politik praktis yang melanggar aturan, khususnya berkampanye di masjid. Sebab ada konsekuensi pidana yang membayangi pelaku kampanye di rumah ibadah.

"Sanksi yang dikenakan dengan Pasal 280 (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) itu sifatnya pidana, dalam konteks ini kita harus hati-hati," kata Lolly di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Ia berujar bahwa Bawaslu akan berupaya untuk mencegah hal ini terjadi. Selain penindakan, Bawaslu juga memang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan atas pelanggaran-pelanggaran. ● han

Heboh Rekening Jumbo Calon Hakim Agung, Ngakunya Berasal dari Warisan Orang Tua

JAKARTA (IM) - Rekening jumbo Triyono, pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang juga calon hakim agung, Triyono Martanto, mengejutkan publik. Sebab hakim pajak itu memiliki kekayaan kas Rp 31 miliar. Triyono, mengaku bahwa hartanya berasal dari warisan orang tua.

Triyono diketahui pernah menjabat Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip pada Minggu (26/3), Triyono Martanto tercatat memiliki total kekayaan sebanyak Rp 9.116.022.717 pada 2019. Kemudian pada 2020, hartanya mengalami kenaikan menjadi Rp 19.806.171.625. Lalu, pada 2021 total harta kekayaan Triyono Martanto mengalami kenaikan yang spektakuler, yakni menjadi Rp 51.202.526.173. Dari jumlah itu, kekayaan dalam bentuk kas sebanyak Rp 31 miliar.

Perihal kekayaan fantastis itu pernah ditanyakan oleh anggota KY Sukma Violetta dalam wawancara terbuka seleksi hakim agung. Triyono menyebut uang itu adalah

warisan dari ibunya yang meninggal pada 2020. Warisan itu dalam bentuk tabungan, SBI, dan deposito.

"Ketika ibu meninggal, harta warisan Ro 100 miliar lebih?" tanya Sukma saat wawancara seleksi hakim agung.

"Nggak tahu ya. Yang bagi adik saya. Yang mengu-rus terkait waris itu adik saya. Warisan cash dibagi sama rata," jawab Triyono.

"Kapan pembagian warisan?" tanya Sukma.

Uang itu disebut Triyono ditransfer dalam satu tahun.

"Bertahap. Karena ibu investasi deposito, SBI, tabungan, maka dibagi menunggu jatuh temponya. Jatuh tempo langsung dibagi ke anak-anak. Mulainya transfer dari 2021," jawab Triyono.

Sebagaimana diketahui, Komisi Yudisial (KY) meluluskan 6 calon hakim agung pada awal 2023, yaitu: Annas Mustaqim, Sukri Sulumin, Lucas Prakoso, Imron Rosyadi, Luluk Tri Cahyaningrum, dan Triyono Martanto.

Tiga calon hakim ad hoc HAM tingkat kasasi yaitu: Fatan Riyadhi, Heppy Wajongkere, dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Harnoto. ● han



FOTO: ANI

KAMPANYE ORANGUTAN TAPANULI

Direktur Yayasan Orngutan Sumatera Lestari-Orngutan Information Centre Fransisca Ariatiningsih memberikan pemaparan saat Road Show Kampanye Orngutan Tapanuli di Kampus UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Sabtu (25/3). Kegiatan oleh Yayasan Kehati, Yayasan Orngutan Sumatera Lestari dan The Body Shop yang diikuti oleh ratusan mahasiswa tersebut menjadi media kampanye untuk kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia khususnya Orngutan Tapanuli.

INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 14 April 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara

Jalan Letjen Suprpto No. 108
Banjarnegara - 53418

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin
Kantor Purwokerto (0281) 624038

Hormat Kami,

PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin



FOTO: ANI

LATIHAN PRA JALASESYA TARUNA AAL

Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksamana Muda TNI Yagan Sofyan (tengah) memberikan arahan kepada Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) tingkat I angkatan ke-71 saat sandar di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (25/3). Sebanyak 250 personel terdiri dari 236 orang taruna dan 14 orang taruna wanita tersebut mengikuti latihan praktek pelayaran Pra Jalasesya 2023 untuk mengenalkan secara langsung dasar kematraan, tradisi dan peraturan urusan dinas dalam khas TNI AL pada saat berlayar.

mandiri
PENGUMUMAN

Telah dilakukan Pengalihan Piutang dan Atau Cessie fasilitas kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada Tanggal 24 Maret 2023 dengan keterangan sebagai berikut :

- 1.) Nama Debitur CV. San Nura Fita Agung.
- 2.) Nilai Pengalihan Piutang (Cessie) sebesar Rp.2.699.894.301,78.
- 3.) Cessionaris a.n Sdr. Erlim Saat, beralamat di Jl. RC Veteran No.80 RT.003/001 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan - DKI Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tmt 24 Maret 2023 seluruh kewajiban hutang kredit atas nama CV. San Nura Fita Agung telah beralih kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas.

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Jakarta 2